

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PASCA DITERBITKANNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13/G TAHUN 2019 TERTANGGAL 19 JUNI 2019 MENGENAI PEMBERIAN GRASI KEPADA PELAKU PEDOFILIA DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

THERESA MARGARET SURYANI

1687005

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi di *Jakarta International school* dimana terjadi suatu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang menjadi sebelumnya menjadi guru di sekolah itu, Lemahnya hukum dan lambannya pengusutan kasus pelecehan seksual tidak pernah tuntas dan selalu berujung pada ketidakadilan terhadap korban, dan kasus ini selalu dianggap sepele. Dengan melepaskan pelaku pelecehan seksual akan memberikan peluang bagi pelaku lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga semakin maraknya kasus pedofilia. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, Dalam kajian terhadap kewenangan konstitusional atau Hak Prerogatif Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada terpidana, terutama kewenangan yang pada pelaksanaannya bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak tersentuh kontrol dari lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menilai pelaksanaan kekuasaan tersebut. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung yang dikaji didasarkan pada ketentuan-ketentuan formal yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dengan penelitian penulis, Pengajuan permohonan grasi yang diajukan oleh tersangka ini memang telah sesuai dengan Prosedur pengajuan grasi yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, akan tetapi secara substansi keputusan ini melukai masyarakat, terkhususnya keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan atas pelecehan seksual yang dialami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan presiden mengenai grasi kepada pelaku pedofilia ini bertentangan dengan tiga Asas dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas transparansi, Asas Proposionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Kata kunci : *Grasi, Pelaku Pedofilia & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE POST OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 13/G OF 2019 DATED JUNE 19, 2019 REGARDING THE GRANTING OF CLEMENCY TO PERPETRATORS OF PEDOPHILIA ATTRIBUTED TO THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE

THERESA MARGARET SURYANI

1687005

This research discusses the problems that occurred at the Jakarta International School where there was a sexual harassment committed by foreign nationals who had previously become teachers in the school, The weakness of the law and the death of sexual harassment are never complete and always lead to injustice to the victims, and the case is always considered trivial. By releasing the perpetrators will provide opportunities for other perpetrators to do the same, so as the case of pedophilia. The existence of Law No. 35 of 2014 for changes in Law number 23 year 2002 on child protection certainly provides fresh wind for Indonesian people. Because, in this act, giving more severe sanctions to the perpetrators of children with the penal CODE is subject to sexual offenders.

This research uses normative legal research methods. Normative research is also called by research on doctrinal law, in a study of the constitutional authority or the presidential prerogative and consideration of the Supreme Court in granting clemency to the convicted, especially the authority on Its implementation is independent and absolute in the sense of the untouched control of institutions that have the competence and capability to assess the implementation of such power. The mechanisms of implementation of the President and the judgment of the Supreme Court are based on the formal provisions stipulated in the CONSTITUTION of 1945 and the prevailing laws and regulations in Indonesia. Based on the research of the author, application of clemency submitted by the suspect is indeed in accordance with the procedure of application of clemency set forth in the Law of the Republic of Indonesia number 22 year 2002 about the clemency, but The substance of this decision hurt the community, especially the family of victims who felt no justice for the sexual harassment experienced.

The results showed that the presidential decree on clemency to the perpetrators of this pedophilia contradicts the three principles of good governance general principles, namely principles of transparency, principles of proposionality, and principles of accountability..

Keywords: Clemency, Perpetrators of pedophilia & The general principles of good governance.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar pernyataan keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Lembar persetujuan revisi Tugas Akhir.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Sejarah Perkembangan Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia.....	25
B. Definisi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	27
C. Fungsi Asas Umum Pemerintahan yang Baik	32
D. Pengertian Macam-macam AUB.....	44
1. Asas Kepastian Hukum.....	44
2. Asas keterbukann.....	45
3. Asas Kemanfaatan.....	46
4. Asas Kepentingan Umum.....	47
5. Asas Kecermatan.....	47
6. Asas tidak menyalahgunakan wewenang.....	48
7. Asas Pelayanan yang baik.....	49
8. Asas tertib penyelenggaraan.....	49
9. Asas Akuntabilitas.....	50
10. Asas Proposionalitas.....	51
11. Asas Profesionalitas.....	51

BAB III PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF

A. Pengertian grasi secara umum.....	53
---	-----------

B . Prosedur Pemberian Grasi berdasarkan pada Undang-undang nomor 10 tahun 2010.....	55
C.Bentuk Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi.....	59
D. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana.....	62
 BAB IV TINJAUAN YURIDIS PASCA DITERBITKANNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13/G 2019 TERTANGGAL 19 JUNI 2019 MENGENAI PEMBERIAN GRASI KEPADA PELAKU PEDOFILIA DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	
A. Pemberian grasi dikaitkan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance).....	74
B. konsekuensi yuridis dari keluarnya grasi bagi pelaku pedofilia di tinjau dari segi Perlindungan Anak.....	88
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
 LAMPIRAN	
• Foto Kunjungan ke Kementrian Sekretaris Negara	
• CV (<i>Curriculum vitae</i>)	
• Matrix Revisi	